

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan KTTA ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2022 yang digunakan oleh KPPN Jakarta II dalam penyusunan RKA-KL sebagai batas tertinggi anggaran yang digunakan untuk menghasilkan biaya komponen atas output SBM berfungsi sebagai alat reviu *baseline*, serta yang besarnya tidak dapat dilampaui SBM sebagai estimasi sesuai dengan pertimbangan harga pasar yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penulisan KTTA ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Dengan adanya penerapan SBM TA 2022 dalam penyusunan RKA-KL di KPPN Jakarta II, terlihat dari segi penyerapan anggaran yang naik dan menjadi lebih tinggi, namun untuk total pagu tetap sama.
 - 1.a. Dari segi pendapatan, yang bekerja sebagai PPNNP mengalami penambahan UMR. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan SBM selalu di update sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.
 - 1.b Dalam penerapan SBM TA 2022, KPPN Jakarta II turut serta melakukan penyesuaian dalam RKA-KL terhadap kondisi pandemik saat ini.

2. Secara garis besar, penerapan SBM TA 2022 dalam penyusunan RKA-KL di KPPN Jakarta II sudah cukup baik, namun terlihat dari rincian kertas kerja RKA-KL, bahwa ada beberapa ketidaksesuaian penyusunan RKA-KL dengan ketentuan yang ada di SBM 2022.

2.a. Dalam penerapan SBM TA 2022, KPPN Jakarta II tidak mengalami kendala atau permasalahan yang berarti. Namun karena situasi pandemi, banyak pengadaan yang dilakukan secara online sehingga penggunaan SBM sebagai dasar penyusunan RKA-KL menjadi tidak optimal.

2.b. Jika dibandingkan dengan penerapan SBM pada tahun sebelumnya, ada sedikit perbedaan yang terjadi dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2022 di KPPN Jakarta II, yaitu pada Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pembentukan PMK SBM tahun anggaran 2022 sudah sesuai dengan urgensinya, mengingat tarif input standar merupakan biaya satuan berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghitung biaya komponen keluaran dalam pembuatan RKA-K/L TA 2022. Pada dasarnya, satuan biaya ini dapat memberikan manfaat keperluan satker seperti dalam pengadaan barang dan jasa, operasional, ataupun perjalanan dinas. Hal ini dapat diamati dalam penerapan penggunaan SBM sebagai batas tertinggi penggunaan anggaran di KPPN Jakarta II. Dengan begitu, biaya-biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan program atau kegiatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.